Demokrasi di Era Algoritma:
Siapa yang Mengendalikan Ruang Publik?



1 SIAPA YANG MEMENGARUHI?

- Platform
- Negara
- Kampanye & pengiklan
- Media
- Warga

2 BAGAIMANA KENDALI BEKERJA?

1. Data dan profil
2. Ranking dan rekomendasi
3. Moderasi dan penghapusan
4. Iklan dan jangkauan

3 DAMPAK BAGI DEMOKRASI

PELUANG

- Akses informasi
- Suara warga lebih luas
- Mobilisasi publik

RISIKO

- Jangkauan timpang
- Ruang gema dan polarisasi
- Moderasi bias
- Manipulasi iklan politik

4 KONTROL DEMOKRATIS

- Transparansi yang bermakna
- Audit independen
- Hak banding dan koreksi
- Perlindungan privasi dan pluralisme

Aturan visibilitas publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada warga.

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf | IBM-ASMI | RudyCT Academic Series

Demokrasi di Era Algoritma: Siapa yang Mengendalikan Ruang Publik?

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf

| IBM-ASMI | RudyCT Academic Series | 2026

ABSTRAK

Ruang publik merupakan tempat warga memperoleh informasi, memperdebatkan persoalan bersama, membentuk pendapat, dan meminta pertanggungjawaban penguasa. Dalam masyarakat digital, ruang ini semakin dimediasi oleh algoritma yang memilih, mengurutkan, merekomendasikan, menghapus, atau menghasilkan konten. Keputusan tersebut dilakukan oleh platform komersial, lembaga negara, pengiklan, organisasi politik, dan penyedia teknologi melalui sistem yang tidak selalu dapat dilihat atau dipahami warga. Artikel konseptual ini mengkaji siapa yang mengendalikan ruang publik digital, melalui mekanisme apa kendali itu bekerja, dan bagaimana prinsip demokrasi dapat diterapkan pada tata kelolanya. Argumen utamanya menyatakan bahwa kendali tidak berada pada satu aktor atau satu algoritma, tetapi tersebar dalam rantai sosio-teknis yang meliputi kepemilikan infrastruktur, tujuan optimasi, data, sistem rekomendasi, moderasi konten, pasar iklan, kebijakan negara, dan kebiasaan pengguna. Mediasi algoritmik dapat memperluas akses dan partisipasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan jangkauan, personalisasi yang tidak transparan, moderasi yang bias, ketergantungan pada perusahaan, dan risiko manipulasi informasi. Artikel menekankan bahwa demokrasi memerlukan lebih dari keterbukaan teknis: diperlukan keterjelasan alasan, akses audit independen, hak banding, perlindungan privasi, pluralisme, dan mekanisme kontrol publik yang berdaya. Dengan menautkan perkembangan global pada konteks Indonesia, artikel mengusulkan tata kelola berlapis yang melibatkan

pemerintah, platform, media, partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil. Tujuannya bukan menghapus algoritma dari komunikasi publik, melainkan memastikan bahwa sistem yang mengatur visibilitas dan partisipasi tunduk pada kepentingan warga dan nilai demokrasi.

Kata kunci: demokrasi digital; ruang publik; algoritma; platform; moderasi konten; tata kelola; Indonesia.

PENDAHULUAN

Ruang publik adalah lingkungan tempat masyarakat membahas persoalan yang menjadi urusan bersama. Di dalamnya, warga menyampaikan pengalaman, menguji klaim, berdebat mengenai kebijakan, dan memberi mandat kepada lembaga politik. Ruang publik tidak pernah sepenuhnya netral. Pada berbagai masa, akses berbicara dan didengar dipengaruhi oleh kepemilikan media, tingkat pendidikan, sumber daya ekonomi, status sosial, sensor, serta struktur politik. Perubahan teknologi komunikasi mengubah siapa yang dapat berbicara, kepada siapa pesan menjangkau, dan seberapa cepat pendapat beredar. Digitalisasi menambahkan lapisan baru: akses pada perhatian publik semakin ditentukan oleh algoritma yang bekerja di balik mesin pencari, media sosial, portal berita, aplikasi video, layanan pesan, dan sistem rekomendasi.

Pertanyaan pada judul artikel ini—siapa yang mengendalikan ruang publik?—tidak dapat dijawab dengan menyebut "algoritma" seolah-olah kode komputer memiliki kehendak sendiri. Algoritma dirancang, dipilih, dilatih, dikonfigurasi, dan diubah oleh organisasi. Ia menggunakan data yang berasal dari perilaku pengguna, sumber komersial, lembaga publik, dan mitra. Ia dioptimalkan untuk tujuan tertentu: relevansi, waktu penggunaan, interaksi, pendapatan iklan, keamanan, atau keteraturan layanan. Keputusan organisasi tersebut menjadi aturan praktis yang membentuk apa yang terlihat, apa yang tenggelam, siapa yang dapat mengiklankan pesan, dan bagaimana pengguna

memahami informasi. Kendali karenanya tersebar di antara perusahaan teknologi, pemilik media, pemerintah, pengiklan, kampanye politik, pengembang sistem, dan pengguna; tetapi penyebaran tersebut tidak berarti kuasanya terbagi rata.

Platform digital memegang posisi istimewa karena menjadi perantara bagi banyak aktivitas sosial yang sebelumnya berlangsung melalui institusi yang berbeda. Satu perusahaan dapat menguasai jaringan komunikasi, sistem periklanan, alat analitik, antarmuka distribusi berita, dan sistem rekomendasi. Melalui layanan tersebut, perusahaan mengatur kondisi praktis bagi ekspresi dan perjumpaan politik, meski secara hukum ia bukan negara dan tidak memiliki mandat elektoral. Platform menetapkan syarat layanan, memutuskan konten yang dapat dimonetisasi, menghapus akun, membatasi jangkauan, serta mengembangkan fitur yang memengaruhi perilaku pengguna. Keputusan tersebut dapat memiliki konsekuensi publik tanpa harus melalui proses legislatif atau deliberasi demokratis.

Namun, gambaran yang hanya menempatkan platform sebagai penguasa tunggal juga terlalu sederhana. Negara menentukan batas hukum, kewajiban penyedia layanan, dan aturan pemilu; pemerintah juga menggunakan sistem digital untuk layanan maupun pengawasan. Organisasi berita memutuskan bagaimana mengemas berita dan menautkan distribusi pada platform. Partai dan kandidat membeli iklan, mengelola akun, serta memanfaatkan data untuk menjangkau kelompok sasaran. Pengguna berinteraksi dengan sistem, membagikan konten, melaporkan penyalahgunaan, atau menghindari rekomendasi melalui pilihan pengaturan. Pihak-pihak ini memiliki tingkat kemampuan yang berbeda untuk memengaruhi sistem, mengetahui cara kerjanya, dan mengoreksi akibatnya.

Artikel ini menggunakan istilah “ruang publik algoritmik” untuk menyebut ruang komunikasi publik yang struktur visibilitas, distribusi, moderasi, dan interaksinya sebagian besar dimediasi oleh sistem komputasional. Istilah tersebut tidak berarti semua percakapan publik berlangsung secara otomatis

atau seluruh warga hanya menjadi objek algoritma. Ia mengarahkan perhatian pada pengaruh sistem yang mengurutkan kemungkinan pertemuan informasi. Seorang warga dapat mengakses ribuan konten, tetapi hanya melihat sebagian kecil yang dipilihkan. Seorang jurnalis dapat menerbitkan laporan yang berkualitas, tetapi jangkauannya bergantung pada mesin pencari dan rekomendasi. Seorang kandidat dapat menyebarkan gagasan, tetapi kemampuan menjangkau pemilih dipengaruhi biaya iklan, data, jaringan, dan peringkat platform.

Artikel ini menjawab empat pertanyaan. Pertama, apa arti ruang publik bagi demokrasi dan bagaimana konsep tersebut berubah di bawah mediasi algoritmik? Kedua, aktor dan mekanisme apa yang mengendalikan visibilitas, distribusi, dan moderasi informasi? Ketiga, bagaimana pengendalian tersebut memengaruhi pluralisme, kebebasan berekspresi, deliberasi, dan kesetaraan politik? Keempat, tata kelola apa yang dapat memberi warga pengaruh nyata atas sistem yang membentuk ruang publik? Jawaban dikembangkan melalui sintesis literatur komunikasi politik, platform governance, moderasi konten, tata kelola algoritmik, dan kebijakan digital. Pembahasan bersifat konseptual; contoh dan temuan penelitian digunakan untuk menerangkan mekanisme, bukan mengklaim bahwa satu faktor teknologi menjelaskan seluruh perubahan politik.

ARGUMEN UTAMA DAN BATAS PEMBAHASAN

Tesis artikel ini adalah bahwa kendali atas ruang publik digital berlangsung dalam rantai keputusan yang saling terkait. Rantai itu dimulai dari siapa memiliki infrastruktur, siapa mengumpulkan dan menguasai data, siapa menentukan ukuran keberhasilan, bagaimana sistem memilih serta mengurutkan konten, siapa menetapkan aturan moderasi, dan bagaimana hasil keputusan dapat diajukan banding. Kekuatan politik muncul ketika aktor tertentu dapat menentukan kondisi komunikasi tanpa keterlihatan atau koreksi yang sebanding. Karena itu, masalah demokratisnya bukan keberadaan algoritma semata, melainkan konsentrasi kuasa, ketertutupan keputusan, ketimpangan kapasitas, dan lemahnya hak warga untuk memengaruhi aturan.

Pembahasan membedakan tiga jenis kendali. Kendali infrastruktural adalah kemampuan menentukan akses pada jaringan, aplikasi, penyimpanan data, model dasar, serta perangkat distribusi. Kendali prosedural adalah kemampuan mengatur bagaimana konten diurutkan, direkomendasikan, diberi label, dibatasi, atau dihapus. Kendali epistemik adalah kemampuan menentukan informasi yang dianggap relevan, kredibel, atau layak dipercaya. Ketiganya berinteraksi. Platform yang menguasai infrastruktur dapat mengubah prosedur ranking; sistem ranking menentukan informasi yang lebih sering dijumpai; frekuensi paparan kemudian dapat ikut memengaruhi penilaian warga mengenai isu penting atau sumber yang terpercaya.

Fokus artikel ialah tata kelola ruang komunikasi publik digital, terutama media sosial, mesin pencari, agregator berita, dan layanan konten audiovisual. Artikel tidak memeriksa seluruh bidang AI seperti diagnosis kesehatan atau otomatisasi industri, kecuali ketika memberi contoh perbandingan tata kelola. Analisis juga tidak menganggap bahwa algoritma selalu mempolarisasi masyarakat atau bahwa semua warga menerima rekomendasi secara pasif. Riset menunjukkan bahwa sistem memengaruhi paparan dan interaksi, tetapi hasilnya bergantung pada desain platform, kebiasaan pengguna, identitas sosial, struktur media, dan konteks politik. Efek rata-rata dalam satu negara belum tentu berlaku pada negara lain.

RUANG PUBLIK DAN LANDASAN DEMOKRASI

Gagasan ruang publik menekankan pentingnya tempat di mana persoalan privat dapat dibawa menjadi pembicaraan bersama. Warga perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan klaim, mendengar pengalaman yang berbeda, memeriksa fakta, dan memengaruhi keputusan. Ruang publik yang demokratis bukan ruang tanpa konflik. Ia justru memungkinkan konflik disampaikan secara terbuka melalui prosedur yang melindungi martabat, kesetaraan, dan hak untuk berbicara. Pluralisme menuntut kehadiran berbagai suara, sedangkan deliberasi menuntut agar pendapat dapat dihadapkan pada alasan dan bukti.

Empat syarat praktis dapat digunakan untuk menilai ruang publik. Pertama, akses: warga dapat masuk, memperoleh informasi, dan berpartisipasi tanpa hambatan yang tidak adil. Kedua, keberagaman: kelompok dan pandangan yang berbeda dapat terlihat serta didengar. Ketiga, kualitas komunikasi: klaim publik dapat diperiksa, dikritik, dan diperbaiki. Keempat, keterhubungan dengan keputusan: percakapan warga memiliki jalur menuju lembaga dan kebijakan. Ukuran keberhasilan bukan jumlah komentar atau tingkat keterlibatan semata. Platform dapat menghasilkan interaksi tinggi tetapi percakapan itu tidak memberi warga pengaruh atas agenda publik.

Ruang publik selalu terkait dengan struktur ekonomi dan politik. Surat kabar yang dimiliki kelompok bisnis tertentu dapat memberi ruang lebih luas pada kepentingan pemilik. Televisi yang dikendalikan negara dapat menutup kritik. Internet memperluas kemampuan individu menerbitkan pesan, tetapi biaya untuk memperoleh jangkauan, mengelola data, dan membangun jaringan tetap terkonsentrasi. Digitalisasi karenanya tidak menghapus ketimpangan lama; ia mengubah bentuk dan skalanya. Dalam sejumlah hal, warga kini dapat menjangkau audiens tanpa meminta izin editor. Dalam hal lain, algoritma dan iklan menentukan apakah pesan mencapai audiens di luar jaringan pengikut yang sudah ada.

Demokrasi menghendaki agar distribusi kesempatan berbicara tidak sepenuhnya bergantung pada kekayaan atau kedekatan dengan pemilik infrastruktur. Kesetaraan politik tidak berarti setiap pesan memperoleh jangkauan identik. Ia menuntut prosedur yang tidak secara sistematis menguntungkan pihak tertentu tanpa alasan publik yang dapat diuji. Jika satu kelompok dapat membeli data dan distribusi berskala besar sementara pesaingnya tidak mengetahui siapa yang melihat iklan politik, maka hak formal untuk berkampanye tidak menghasilkan kesempatan yang setara.

ALGORITMA SEBAGAI PENGATUR VISIBILITAS

Algoritma adalah prosedur komputasional untuk mengubah masukan menjadi keluaran melalui seperangkat aturan. Dalam praktik platform, sistem

rekomendasi menggunakan berbagai sinyal—misalnya interaksi sebelumnya, hubungan jaringan, topik, waktu, lokasi, dan karakteristik konten—untuk memperkirakan materi yang mungkin menarik bagi pengguna. Sistem ranking kemudian menyusun urutan. Moderasi otomatis mengklasifikasikan konten yang berpotensi melanggar kebijakan. Iklan tertarget menghubungkan profil audiens dengan pesan komersial atau politik. Setiap prosedur tersebut menjalankan fungsi yang berbeda, namun semuanya mengubah kemungkinan suatu pesan dilihat dan dipahami.

Keluaran algoritmik sering tampak sebagai daftar yang alamiah: “terbaru”, “populer”, “untuk Anda”, atau “paling relevan”. Padahal, urutan tersebut merupakan hasil pilihan desain dan model bisnis. Ketika pengguna membuka umpan berita, mereka tidak melihat keseluruhan informasi yang tersedia, melainkan seleksi yang dihasilkan berdasarkan aturan tertentu. Aturan itu dapat berubah tanpa pemberitahuan rinci. Pengguna tidak hanya memilih konten; sistem juga memilih di antara konten yang mungkin dipilih pengguna. Hubungan ini bersifat timbal balik: perilaku terdahulu digunakan untuk memprediksi tindakan berikutnya, dan prediksi tersebut memengaruhi paparan masa depan.

Penting untuk membedakan kurasi algoritmik dari sensor. Sensor biasanya membatasi atau melarang konten secara eksplisit. Ranking dapat mengurangi jangkauan tanpa menghapus unggahan. Akun mungkin tetap aktif tetapi tidak muncul dalam rekomendasi atau pencarian. Praktik semacam ini kadang disebut penurunan visibilitas atau demosi. Dari sisi demokrasi, konsekuensinya dapat setara dengan pembatasan ujaran jika terjadi secara luas, tetapi lebih sulit dikenali karena pengguna tidak selalu mendapat pemberitahuan. Transparansi kebijakan moderasi karena itu perlu mencakup bukan hanya penghapusan, melainkan juga cara sistem membatasi distribusi.

Visibilitas bukan perkara teknis kecil. Perhatian publik adalah sumber daya yang terbatas. Ketika sebagian konten lebih sering ditampilkan, ia memiliki peluang lebih tinggi untuk dibaca, dibagikan, diperdebatkan, dan diingat. Riset

tentang amplifikasi algoritmik di Twitter menunjukkan bahwa algoritma dapat memperkuat distribusi sumber berita politik tertentu dibandingkan urutan kronologis, meskipun temuan semacam itu harus dibaca sesuai platform, periode, dan konteks yang diuji (Huszár et al., 2022). Studi Facebook juga membedakan inventaris berita yang mungkin dilihat pengguna dari paparan aktual setelah kurasi dan interaksi, menunjukkan bahwa efek algoritma perlu dianalisis bersama pilihan pengguna (Bakshy et al., 2023).

Kendali atas visibilitas dapat bekerja melalui beberapa pilihan. Bobot yang diberikan pada interaksi dapat menaikkan unggahan yang memancing reaksi kuat. Penggunaan riwayat perilaku dapat mempersempit atau justru memperluas keberagaman informasi. Sinyal hubungan sosial dapat mengutamakan konten dari lingkaran pertemanan. Kebijakan pembayaran dapat membuat konten sponsor lebih mudah muncul. Penentuan bahasa dan kategori dapat membuat konten lokal kurang mudah ditemukan. Tidak satu pun pilihan ini bersifat netral secara politik karena masing-masing menghasilkan distribusi kesempatan berbicara yang berbeda.

SIAPA YANG MENGENDALIKAN RUANG PUBLIK

Platform teknologi mengendalikan banyak aturan operasional. Mereka menentukan desain fitur, sumber data, tujuan optimasi, kebijakan moderasi, syarat penggunaan, dan akses bagi pihak luar. Kuasa mereka bertambah ketika layanan menjadi infrastruktur sehari-hari bagi komunikasi, informasi, perdagangan, dan organisasi politik. Walau terdapat banyak platform, sifat jaringan dan biaya perpindahan dapat mendorong konsentrasi. Pengguna sulit meninggalkan layanan apabila keluarga, komunitas, pelanggan, atau kelompok politiknya tetap berada di sana. Ketergantungan ini memberi perusahaan posisi tawar besar terhadap individu dan lembaga.

Negara memegang kuasa melalui hukum, regulasi, penegakan, pengadaan, serta akses terhadap data. Negara dapat mewajibkan keterbukaan tertentu, melindungi hak, dan membatasi praktik yang merugikan. Ia juga dapat meminta penghapusan konten, memblokir layanan, melakukan pengawasan,

atau menekan platform untuk mengubah kebijakan. Karena itu, intervensi negara tidak otomatis demokratis. Ukuran legitimasi mencakup dasar hukum, kebutuhan, proporsionalitas, transparansi, pengawasan yudisial, dan kesempatan bagi pihak terdampak untuk menggugat.

Pengiklan dan kampanye politik memiliki kendali melalui pembelian distribusi dan penggunaan data. Sistem iklan digital memungkinkan pesan disampaikan kepada segmen yang sempit, sementara pesan dapat berbeda antarkelompok dan tidak terlihat oleh publik luas. Ketika tidak ada arsip iklan yang dapat dicari, jurnalis dan pemilih sulit menguji konsistensi janji atau mengidentifikasi praktik diskriminatif. Pihak yang memiliki data lebih kaya dan anggaran lebih besar mampu menguji variasi pesan lebih banyak, lalu mengoptimalkan kampanye berdasarkan respons audiens.

Organisasi media juga berperan sebagai perantara. Penerbit memilih berita, tetapi semakin sering harus menyesuaikan format dengan mesin pencari, rekomendasi, video singkat, dan metrik keterlibatan. Ketergantungan lalu lintas pada platform dapat memengaruhi keputusan editorial, alokasi anggaran, dan bentuk jurnalisme. Media yang kehilangan pendapatan iklan dapat mengalami kesulitan membiayai liputan investigatif. Jika ekosistem informasi kehilangan sumber berita independen, ruang publik menjadi lebih rentan pada konten viral yang tidak diverifikasi.

Pengguna bukan aktor tanpa kuasa. Mereka membuat pilihan, membangun komunitas, mengoreksi informasi, melaporkan penyalahgunaan, mengorganisasi kampanye, dan menggunakan fitur untuk mengendalikan umpan. Namun kemampuan ini dibatasi oleh desain yang tidak selalu menyediakan pilihan bermakna, ketimpangan literasi, dan kurangnya informasi tentang alasan rekomendasi. Pilihan individual untuk menekan “tidak tertarik” tidak menggantikan hak kolektif untuk mengetahui bagaimana sistem publik bekerja atau meminta platform memperbaiki praktik yang merugikan.

Penyedia model AI generatif kini menambah aktor baru. Model yang menjawab pertanyaan, merangkum berita, membuat konten, atau menjadi

antarmuka pencarian dapat menjadi lapisan kurasi yang lebih langsung. Ketika warga meminta sistem merangkum perdebatan kebijakan, model memilih sumber, membentuk sintesis, dan menentukan apa yang dihilangkan. Jika jawaban disampaikan dengan nada pasti tetapi tidak menunjukkan asal informasi, pengguna mungkin tidak dapat memeriksa bagaimana kesimpulan dibentuk. Model dasar juga bergantung pada data dan standar konten yang dikendalikan pengembangnya.

KUASA KOMERSIAL DAN MODEL BISNIS PERHATIAN

Banyak layanan digital dibiayai oleh iklan. Agar pendapatan meningkat, perusahaan memiliki insentif untuk mempertahankan perhatian, mengukur respons, dan meningkatkan kemungkinan pengguna kembali. Model bisnis ini tidak dengan sendirinya menghasilkan manipulasi, tetapi dapat mendorong optimasi yang lebih mengutamakan keterlibatan daripada kualitas deliberasi. Konten yang memicu kejutan, kemarahan, atau rasa takut sering lebih mudah menghasilkan reaksi cepat daripada penjelasan kebijakan yang panjang. Jika sistem belajar dari sinyal tersebut, ia dapat mengutamakan materi dengan respons emosional kuat meskipun dampaknya pada pemahaman publik tidak positif.

Metrik keterlibatan juga mengubah cara organisasi politik dan media bekerja. Tim komunikasi dapat menilai keberhasilan dari jumlah tayangan, komentar, dan pembagian; redaksi dapat menggeser sumber daya ke materi yang menghasilkan klik; influencer dapat menyesuaikan gaya komunikasi dengan logika rekomendasi. Pengukuran ini dapat memperluas jangkauan dan memberi umpan balik cepat, tetapi mendorong kesan bahwa popularitas sama dengan kepentingan publik. Agenda yang substantif namun tidak menghasilkan reaksi segera berisiko tersingkir.

Model bisnis berbasis data membuat pengumpulan informasi menjadi sumber keuntungan. Data bukan hanya menggambarkan preferensi warga, tetapi memungkinkan prediksi dan intervensi. Informasi mengenai lokasi, jaringan, kebiasaan menonton, atau respons terhadap pesan dapat digunakan

untuk menyusun profil. Ketika profil dipakai untuk mempersonalisasi konten politik, warga menghadapi lingkungan informasi yang tidak setara dan sering tidak terlihat. Bahkan bila data tidak secara eksplisit mengungkap pilihan politik, kombinasi berbagai sinyal dapat menghasilkan dugaan yang sensitif.

Karena itu, pembicaraan tentang ruang publik harus menanyakan siapa yang memperoleh nilai ekonomi dari komunikasi warga. Pengguna menghasilkan data dan perhatian, sedangkan platform mengatur distribusi serta memperoleh pendapatan. Penerbit menyediakan informasi tetapi dapat kehilangan kendali atas hubungan dengan audiens. Pengiklan membeli jangkauan yang terukur. Pemerintah dan masyarakat mungkin menanggung akibat sosial dari polarisasi atau disinformasi. Ketidakseimbangan manfaat dan tanggung jawab tersebut merupakan masalah politik ekonomi yang memerlukan kebijakan persaingan, perlindungan data, dan dukungan bagi jurnalisme berkualitas.

SISTEM REKOMENDASI: PERSONALISASI ATAU PEMBENTUKAN GELEMBUNG

Personalisasi dapat meningkatkan relevansi. Pengguna dengan minat tertentu memperoleh lebih cepat informasi yang dicari; warga dapat menemukan kelompok yang membahas masalah yang kurang diperhatikan media arus utama; rekomendasi dapat membantu penerbit kecil menjangkau pembaca yang sesuai. Dalam masyarakat dengan banyak bahasa dan kebutuhan yang beragam, sistem yang baik dapat menyajikan informasi yang lebih mudah dipahami dan sesuai konteks.

Namun personalisasi juga dapat membuat dunia informasi setiap pengguna semakin berbeda. Bila sistem hanya mengoptimalkan kemungkinan interaksi yang telah diprediksi, ia dapat mengulang preferensi terdahulu. Warga mungkin lebih jarang menjumpai berita yang menantang pandangannya, atau bertemu konten berbeda tanpa konteks yang cukup untuk mengevaluasi perbedaan tersebut. Konsep “gelembung filter” dan “ruang gema” sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini, tetapi keduanya tidak boleh

dipakai sebagai penjelasan universal. Paparan selektif telah ada sebelum internet, dan banyak orang memperoleh informasi melalui keluarga, organisasi, televisi, serta media lain di luar satu platform.

Temuan ilmiah perlu membedakan peluang paparan, paparan yang benar-benar terjadi, perhatian, pemahaman, kepercayaan, dan perubahan sikap. Jika sebuah studi menemukan bahwa pengguna yang sudah memiliki pandangan tertentu melihat lebih banyak berita sejenis, belum tentu algoritma menyebabkan polarisasi. Pengguna dapat secara aktif memilih sumber, sedangkan sistem menguatkan pilihan tersebut. Sebaliknya, bila pengguna menemukan konten yang tidak mereka cari, rekomendasi juga dapat memperluas paparan. Karena efeknya bergantung pada kondisi, kebijakan sebaiknya berlandaskan audit konkret terhadap sistem dan hasil, bukan asumsi bahwa semua personalisasi buruk.

Pilihan desain dapat mengurangi ketergantungan pada satu sinyal. Platform dapat menawarkan umpan kronologis, rekomendasi berdasarkan topik, pengaturan untuk mengurangi personalisasi, dan penjelasan mengapa konten ditampilkan. Pengguna seharusnya dapat memindahkan preferensi dan mengatur feed tanpa kehilangan akses pada jaringan sosialnya. Alternatif ini tidak menghapus kuasa platform, namun memperluas kontrol individual dan membuat tujuan sistem lebih dapat dipahami. Pilihan juga perlu diuji agar tidak hanya tersedia di menu tersembunyi yang sulit ditemukan.

MODERASI KONTEN SEBAGAI KEPUTUSAN POLITIK

Moderasi diperlukan karena ruang digital dapat dipakai untuk ancaman, pelecehan, penipuan, ujaran kebencian, eksploitasi, dan koordinasi kekerasan. Tanpa moderasi, kelompok rentan dapat kehilangan kesempatan berpartisipasi. Sistem otomatis membantu mendeteksi materi berulang, mengurangi distribusi konten yang jelas melanggar, dan menangani volume besar. Akan tetapi, moderasi bukan hanya persoalan teknis untuk membedakan konten baik dan buruk. Definisi ujaran yang berbahaya, konteks satir, kritik

terhadap penguasa, dan ekspresi identitas merupakan persoalan sosial serta politik.

Gorwa et al. (2020) menjelaskan bahwa moderasi algoritmik menghadapi keterbatasan teknis dan politis. Sistem dapat memperbesar ketertutupan, menimbulkan ketidakadilan baru, dan mengaburkan sifat normatif dari keputusan yang dibuat. Ungkapan yang sama dapat memiliki arti berbeda menurut konteks, dialek, hubungan antarpenutur, atau sejarah kekerasan. Model yang dilatih pada bahasa dominan mungkin keliru mengenali bahasa daerah. Ketika kesalahan ini berulang, sebagian warga menghadapi penghapusan atau penurunan jangkauan lebih sering daripada warga lain.

Moderasi juga menghadapi dilema kecepatan dan keadilan prosedural. Konten berbahaya yang dibiarkan beredar dapat menyebabkan kerugian segera, tetapi penghapusan tanpa penjelasan dapat membungkam kritik atau dokumentasi pelanggaran. Sistem banding yang hanya menyediakan formulir otomatis tidak memulihkan hak jika tanggapan tidak meninjau kasus secara substantif. Platform perlu menyatakan alasan, aturan yang diterapkan, kategori tindakan, dan mekanisme banding. Untuk kasus yang menyangkut kebebasan sipil atau kepentingan publik, peninjauan manusia dan pelibatan ahli konteks lokal menjadi penting.

Transparansi laporan moderasi harus membantu pengawasan. Jumlah unggahan yang dihapus saja tidak cukup. Publik perlu mengetahui kategori pelanggaran, jenis deteksi, tingkat keberatan dan pembalikan, waktu penanganan, bahasa, kawasan, serta perbedaan dampak antarkelompok. Pengungkapan tersebut perlu melindungi data pribadi dan keamanan pengguna. Jika hanya platform yang menilai keberhasilan kebijakannya sendiri, pemerintah, jurnalis, dan masyarakat tidak memiliki dasar untuk menguji apakah moderasi melindungi warga secara adil.

IKLAN POLITIK DAN VISIBILITAS YANG DIBELI

Iklan politik digital menggabungkan pemilihan audiens, pesan, waktu, dan saluran. Kampanye dapat menguji beragam versi iklan lalu mengalihkan

anggaran ke versi yang lebih banyak menghasilkan perhatian. Pesan dapat diarahkan ke kelompok tertentu berdasarkan lokasi, minat, atau karakteristik perilaku. Praktik ini dapat membuat komunikasi lebih efisien, namun mengurangi keterlihatan publik atas apa yang dijanjikan kandidat. Persoalan menjadi serius ketika pesan berbeda kepada kelompok berlainan atau ketika sasaran ditentukan berdasarkan kerentanan politik.

Iklan yang dipersonalisasi dapat mengaburkan kesetaraan. Kandidat dengan sumber daya lebih besar dapat melakukan eksperimen pesan dalam skala lebih luas dan memperoleh informasi lebih banyak tentang respons warga. Kelompok dengan daya beli tinggi berpotensi mendapat akses yang lebih sering kepada kandidat, sementara pemilih yang kurang menguntungkan secara elektoral kurang dijangkau. Jika algoritma optimasi menentukan bahwa kelompok tertentu cenderung memberi respons, kampanye dapat mengabaikan warga lain yang tetap memiliki hak politik setara.

Arsip iklan politik yang dapat dicari merupakan instrumen penting. Arsip sebaiknya memuat sponsor, jumlah belanja atau rentang biaya, karakteristik target, materi kreatif, periode tayang, dan jangkauan. Data perlu disimpan cukup lama untuk evaluasi pascapemilu. Platform dan partai dapat memperjelas apakah konten dibuat atau dimodifikasi dengan AI, terutama jika gambar atau suara dapat disangka dokumentasi autentik. Transparansi bukan sekadar label, melainkan infrastruktur pengawasan yang memungkinkan perbandingan dan pemeriksaan independen.

JURNALISME, INFORMASI PUBLIK, DAN PERAN PENCARIAN

Jurnalisme menyediakan praktik verifikasi, konteks, investigasi, dan pengawasan yang sangat penting bagi demokrasi. Namun distribusi berita melalui platform dapat membuat penerbit bergantung pada perubahan algoritma yang tidak mereka kendalikan. Perubahan ranking dapat mengubah jumlah pembaca secara cepat. Jika pendapatan media bergantung pada tayangan dan iklan, tekanan untuk memproduksi konten yang sesuai dengan

format platform dapat menggeser prioritas dari investigasi mendalam ke materi yang mudah dibagikan.

Mesin pencari dan ringkasan berbasis AI juga membentuk jalur warga menuju pengetahuan. Mesin pencari mengurutkan halaman; jawaban generatif menyintesis isi dari sumber yang dipilih sistem. Ini berpotensi membantu warga menemukan informasi tentang kebijakan publik dan memahami dokumen yang rumit. Namun ringkasan dapat menghilangkan sumber, tidak menampilkan perbedaan pendapat, atau menyampaikan informasi yang keliru seolah-olah pasti. Bila pengguna memperoleh jawaban tanpa membuka sumber aslinya, penerbit dan organisasi pemeriksa fakta mungkin kehilangan insentif ekonomi, sementara warga kehilangan kesempatan mengevaluasi bukti.

Tata kelola informasi tidak dapat diserahkan kepada platform saja. Media independen perlu memiliki model pendanaan yang memungkinkan pemeriksaan fakta dan liputan lokal. Lembaga publik perlu menerbitkan data dan keputusan dengan format yang dapat dicari, terbuka, dan mudah diakses. Pendidikan media harus membantu warga mengenali sumber, memahami kepentingan yang mendasari konten, serta membedakan bukti primer dari rangkuman. Platform perlu memberi atribusi sumber yang jelas dan mekanisme bagi penerbit untuk mengoreksi representasi yang keliru.

PENGARUH GENERATIVE AI PADA RUANG PUBLIK

AI generatif mempercepat produksi teks, gambar, suara, video, dan percakapan sintetis. Organisasi politik dapat menggunakannya untuk merancang materi kampanye, menerjemahkan pesan, menyiapkan variasi pidato, atau menjawab pertanyaan warga. Kelompok masyarakat dapat membuat informasi publik dalam format yang lebih mudah dipahami. Penggunaan tersebut dapat memperluas kemampuan komunikasi bagi organisasi kecil dan warga yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Risikonya muncul bila biaya produksi konten palsu menurun, jumlah pesan meningkat, dan identitas pembuat sulit diketahui. Konten sintetis dapat

menciptakan dukungan semu, menghidupkan kembali tokoh yang telah wafat, meniru suara pejabat, atau membuat dokumen yang tampak resmi. Yang lebih mendasar ialah banjir konten menambah biaya verifikasi. Jurnalis dan warga harus menghabiskan waktu untuk membuktikan bahwa materi tertentu palsu, sementara pembuatnya dapat segera mengeluarkan versi baru.

Ada pula risiko "keuntungan penyangkalan": semakin banyak orang mengetahui bahwa media dapat dipalsukan, semakin mudah tokoh berkepentingan menyangkal rekaman yang autentik. Oleh sebab itu, sistem provenance dan watermark dapat membantu, tetapi tidak menyelesaikan masalah sendirian. Metadata dapat dihapus, platform mungkin tidak menerapkan standar yang sama, dan pengguna bisa tetap tidak memeriksa label. Respons yang lebih kuat menggabungkan provenance, pelabelan yang dapat dipahami, arsip media tepercaya, pemeriksaan fakta, dan prosedur komunikasi krisis.

Penggunaan AI generatif juga dapat memengaruhi kualitas deliberasi ketika chatbot atau agen sintetis menyimulasikan warga. Jika sistem membuat ribuan komentar atau akun yang tampak autentik, ia dapat menciptakan kesan bahwa suatu pandangan memiliki dukungan luas. Ini mengganggu penilaian publik atas ukuran dukungan dan dapat menggeser agenda. Organisasi penyelenggara konsultasi perlu menerapkan metode autentikasi yang proporsional, melaporkan jumlah kontribusi terverifikasi, dan tetap menyediakan kanal partisipasi yang tidak bergantung pada identifikasi biometrik atau pengumpulan data berlebihan.

KETIMPANGAN JANGKAUAN DAN KESETARAAN POLITIK

Hak berbicara tidak sama dengan kemampuan untuk didengar. Dalam ruang digital, jangkauan dapat bergantung pada jumlah pengikut, kemampuan membeli iklan, akses pada analitik, hubungan dengan influencer, dan kecocokan konten dengan sistem rekomendasi. Ketimpangan tersebut membuat distribusi perhatian menjadi sumber daya politik. Warga dapat secara

formal memiliki akses pada platform, namun tidak memperoleh kapasitas yang sebanding untuk menjangkau audiens.

Kelompok marginal dapat mengalami dua bentuk kerugian. Pertama, mereka dapat kurang terlihat karena bahasa, topik, atau jejaringnya kurang dikenal sistem. Kedua, mereka dapat lebih terekspos pada pelecehan dan serangan terkoordinasi ketika berbicara di ruang publik. Moderasi yang buruk dapat membiarkan serangan, sedangkan moderasi yang tidak peka dapat menindak korban atau dokumentasi mereka. Perlindungan demokratis berarti mengatasi kedua masalah tersebut: mengurangi hambatan menyampaikan pendapat dan memperkuat keselamatan warga tanpa melakukan pengawasan berlebihan.

Kesetaraan juga terkait dengan akses terhadap perangkat dan keterampilan. Partisipasi digital menuntut koneksi, perangkat, waktu, literasi, dan kemampuan menilai informasi. Penduduk di daerah yang jaringan internetnya terbatas mungkin tidak dapat mengikuti konsultasi real-time. Warga yang menggunakan bahasa lokal dapat menerima kualitas layanan AI yang lebih rendah. Penyandang disabilitas mungkin menghadapi antarmuka yang tidak dirancang aksesibel. Kebijakan harus menyediakan kanal alternatif, layanan multibahasa, dan standar aksesibilitas; jika tidak, digitalisasi dapat menjadi mekanisme baru untuk menyaring siapa yang dianggap sebagai peserta publik.

KONTEKS INDONESIA: PLURALITAS DAN TANTANGAN TATA KELOLA
Indonesia memiliki masyarakat yang besar dan beragam, dengan perbedaan wilayah, bahasa, infrastruktur, tingkat urbanisasi, akses pendidikan, dan kebiasaan media. Ruang publik Indonesia tersebar di media nasional, media lokal, platform global, layanan pesan, organisasi keagamaan, komunitas daerah, dan jaringan keluarga. Karena itu, satu bentuk sistem moderasi atau rekomendasi tidak akan memiliki dampak seragam. Konten yang dipahami sebagai satire di satu komunitas dapat dianggap sebagai penghinaan di komunitas lain; bahasa yang umum di kota besar dapat berbeda makna di daerah.

Konsentrasi platform global menimbulkan persoalan yurisdiksi, bahasa, dan akses pengawasan. Perusahaan beroperasi lintas batas, sedangkan dampak politiknya terjadi dalam konteks lokal. Regulator nasional dapat kekurangan data dan keahlian untuk menilai sistem rekomendasi atau iklan. Bahasa lokal dan konteks politik Indonesia mungkin tidak menjadi prioritas pengembangan model. Di sisi lain, perusahaan lokal dan pemerintah dapat mengembangkan aplikasi tanpa standar audit atau perlindungan yang memadai. Kedaulatan digital tidak seharusnya dipahami sebagai kemampuan mengendalikan arus informasi semata; ia mencakup kemampuan warga untuk mengawasi penggunaan data dan menuntut pertanggungjawaban.

Bagi Indonesia, isu moderasi berkaitan dengan kebebasan berekspresi, perlindungan dari kekerasan digital, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Aturan perlu mendefinisikan secara jelas tindakan yang dapat dilakukan negara dan platform, prosedur pemberitahuan, standar bukti, serta hak banding. Penghapusan konten secara cepat dapat dibutuhkan untuk ancaman nyata, tetapi keputusan permanen harus dapat ditinjau. Pemerintah harus menyampaikan permintaan penghapusan secara transparan dan tunduk pada pengawasan hukum agar kewenangan tidak digunakan untuk melindungi pejabat dari kritik.

Partai politik dan kandidat perlu mengikuti standar transparansi iklan, penggunaan data, dan materi sintetis. Komisi pemilihan serta pengawas pemilu dapat membangun kerja sama dengan platform dan organisasi pemeriksa fakta untuk merespons informasi pemungutan suara yang keliru. Namun kerja sama harus memiliki protokol yang jelas agar tidak menjadi saluran tekanan politik untuk membungkam kritik. Lembaga pengawas memerlukan sumber daya teknis dan independensi, termasuk kemampuan menganalisis iklan digital, jaringan akun, dan konten berbahasa lokal.

Perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat membangun laboratorium audit independen. Penelitian perlu menguji bagaimana rekomendasi menampilkan isu politik lintas bahasa, apakah jangkauan iklan

berbeda menurut karakteristik wilayah, dan bagaimana moderasi menangani kritik atau ujaran kebencian. Peneliti membutuhkan akses data yang aman dan tidak boleh diwajibkan mengungkap identitas pengguna. Kerja sama lintas disiplin antara ilmu politik, ilmu komputer, hukum, komunikasi, dan antropologi penting karena persoalan ini sekaligus teknis dan kontekstual.

TATA KELOLA DEMOKRATIS: DARI KETERBUKAAN KE KONTROL PUBLIK
Keterbukaan algoritma kerap diperlakukan sebagai jawaban utama. Namun, membuka kode sumber saja belum tentu membuat sistem dapat dipahami atau diawasi. Sistem modern terdiri dari model, data, pengaturan, tujuan bisnis, interaksi manusia, dan pembaruan berkala. Ananny dan Crawford (2018) menunjukkan keterbatasan ideal transparansi: seseorang dapat "melihat" sistem tanpa memahami bagaimana kuasa dibentuk atau siapa yang bertanggung jawab. Akuntabilitas memerlukan relasi yang memungkinkan pihak terdampak mengajukan pertanyaan, memperoleh jawaban, dan memengaruhi hasil.

Pertama, platform harus memberi penjelasan yang berpusat pada dampak. Pengguna perlu mengetahui mengapa konten tertentu direkomendasikan, apakah iklan ditargetkan, bagaimana tindakan moderasi diputuskan, dan bagaimana mengubah pengaturan. Penjelasan harus disediakan pada saat keputusan terjadi, bukan hanya pada dokumen kebijakan panjang. Untuk peneliti dan regulator, informasi harus lebih teknis: tujuan optimasi, input, indikator risiko, perubahan sistem, tingkat kesalahan, dan hasil audit.

Kedua, warga membutuhkan hak prosedural. Jika unggahan dihapus, akun dibatasi, atau iklan ditolak, pengguna harus memperoleh pemberitahuan alasan dan cara mengajukan banding. Jika sistem mengurangi jangkauan, pemberitahuan juga perlu tersedia saat pengurangan itu cukup signifikan untuk memengaruhi hak atau kepentingan publik. Banding harus ditinjau oleh manusia untuk kasus kompleks, dan data mengenai keberatan harus dilaporkan. Mekanisme itu perlu dilindungi dari pembalasan atau penggunaan data tambahan yang tidak diperlukan.

Ketiga, audit independen perlu menilai sistem dan hasil. Audit tidak sebatas memeriksa apakah dokumen prosedur tersedia. Pemeriksa dapat menguji bagaimana rekomendasi bekerja pada beragam akun dan bahasa, apakah iklan politik menjangkau kelompok yang berbeda, serta apakah konten berbahaya atau pelanggaran diperlakukan secara konsisten. Audit perlu memiliki akses cukup, independensi dari perusahaan dan pemerintah, perlindungan data yang kuat, serta kewajiban mempublikasikan ringkasan temuan. Audit yang tidak dapat mengakses data inti dapat berubah menjadi ritual legitimasi tanpa kemampuan mengoreksi praktik.

Keempat, data peneliti harus tersedia dengan perlindungan privasi. Riset publik membantu memahami efek sistem yang perusahaan sendiri tidak dapat nilai secara netral. Akses dapat diberikan melalui lingkungan aman, data teragregasi, protokol etika, dan perjanjian penggunaan. Regulasi Uni Eropa melalui Digital Services Act memuat kewajiban penilaian risiko sistemik bagi platform sangat besar dan menyediakan jalur tertentu untuk akses peneliti. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengawasan sistemik memerlukan akses informasi, bukan hanya kepatuhan pada laporan yang dibuat penyedia layanan.

Kelima, pengguna harus memiliki pilihan yang nyata. Platform dapat menyediakan umpan kronologis, umpan berbasis topik, pengaturan personalisasi, alat untuk meninjau profil yang digunakan dalam rekomendasi, serta interoperabilitas agar pengguna tidak kehilangan komunitas saat berpindah layanan. Pilihan harus mudah dicapai, dapat dijelaskan, dan tidak dirancang dengan pola antarmuka yang memaksa. Kontrol individual perlu dilengkapi kontrol kolektif; keputusan platform yang berdampak pada hak masyarakat harus dapat dibahas melalui prosedur publik.

Keenam, prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian harus diterapkan. Semakin besar potensi dampak pada kebebasan dan proses politik, semakin tinggi tuntutan untuk menguji, mengawasi, dan memberi pemulihan. Pada masa pemilu, perubahan sistem ranking atau moderasi dapat menimbulkan

dampak luas; platform perlu memiliki protokol mitigasi dan saluran koordinasi yang transparan. Respons terhadap risiko tidak boleh berubah menjadi larangan umum terhadap konten politik atau pengumpulan data yang lebih invasif.

KETENTUAN DAN PENGALAMAN REGULASI INTERNASIONAL
Digital Services Act Uni Eropa memberi contoh pendekatan berbasis kewajiban sistemik. Aturan tersebut meminta penyedia layanan sangat besar untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang muncul dari desain atau penggunaan layanan, termasuk risiko pada hak fundamental, wacana sipil, proses pemilu, dan keamanan publik. Kerangka ini juga memuat langkah mitigasi, transparansi, serta kesempatan untuk pengawasan. Komisi Eropa menerbitkan panduan bagi platform sangat besar mengenai mitigasi risiko terhadap proses pemilu. Kekuatan pendekatan tersebut terletak pada perhatian pada desain sistem secara keseluruhan, bukan hanya pada konten individual.

Namun regulasi berbasis risiko juga menghadapi persoalan. Penilaian risiko dapat menjadi dokumen kepatuhan jika tidak ada pemeriksaan independen. Definisi “risiko sistemik” dan pilihan mitigasi memerlukan penilaian normatif. Regulasi dapat mendorong platform menghapus konten secara berlebihan untuk mengurangi potensi sanksi. Akses peneliti dapat terbatas oleh syarat administrasi, keamanan data, atau keputusan perusahaan. Regulasi perlu dievaluasi berdasarkan hasil konkret: apakah warga memperoleh penjelasan dan pemulihan; apakah pluralisme lebih terlindungi; apakah akses data meningkat; dan apakah tindakan benar-benar mengurangi dampak.

Di berbagai negara, peraturan tentang platform, moderasi, data, dan kebebasan berekspresi berbeda. Ada negara yang lebih mengutamakan kewajiban penghapusan, ada yang mendorong transparansi dan audit, dan ada yang memperluas kewenangan negara untuk menentukan informasi yang boleh beredar. Perbandingan kebijakan harus memperhatikan konteks institusi, kebebasan pers, independensi pengadilan, serta kapasitas regulator. Menyalin

aturan asing tanpa menyesuaikan mekanisme pengawasan dapat menciptakan instrumen yang mudah disalahgunakan.

TANTANGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PERAN NEGARA
Negara memiliki tanggung jawab melindungi warga dari kekerasan, ancaman, penipuan, dan manipulasi. Tetapi ia juga dapat menjadi sumber sensor, propaganda, dan pengawasan. Ketika pemerintah meminta platform menghapus konten, publik perlu mengetahui dasar hukum, jenis permintaan, jumlah konten, serta apakah permintaan ditolak atau dipenuhi. Permintaan rahasia tanpa pengawasan dapat membuat platform menjadi alat penegakan politik tanpa proses hukum yang semestinya.

Regulasi harus menghindari definisi luas yang membuat kritik kebijakan, satire, ekspresi oposisi, atau pelaporan jurnalistik mudah dikategorikan melanggar. Tindakan terhadap konten perlu dibedakan berdasarkan tingkat bahaya, konteks, dan proporsionalitas. Pemblokiran seluruh platform atau sistem komunikasi dapat menimbulkan dampak besar terhadap pendidikan, usaha, jurnalisme, dan partisipasi warga. Mekanisme darurat harus memiliki batas waktu, alasan tertulis, serta peninjauan independen.

Kebebasan berekspresi bukan alasan untuk meniadakan perlindungan terhadap kelompok yang menjadi sasaran kebencian atau pelecehan. Platform perlu merespons ancaman terarah dan kampanye intimidasi. Namun kebijakan yang baik tidak hanya menghapus; ia juga menyediakan dukungan bagi korban, menjaga bukti, dan mengurangi pengulangan. Desain pelaporan perlu mempertimbangkan bahwa penyintas tidak seharusnya dipaksa mengulang narasi kekerasan berkali-kali atau menyerahkan lebih banyak data daripada yang diperlukan.

PERUBAHAN POLA KEWARGAAN DAN PEMBENTUKAN PENDAPAT
Media sosial memungkinkan warga mengubah peristiwa lokal menjadi isu nasional. Video singkat dapat menyingkap penyalahgunaan kewenangan, mengorganisasi bantuan, atau mendorong pemerintah memberi respons. Jaringan digital menurunkan biaya koordinasi dan membuka ruang bagi

kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses ke media besar. Dengan demikian, ruang publik algoritmik dapat memperkuat kemampuan warga untuk bertindak bersama.

Namun, pola komunikasi yang cepat dan terfragmentasi juga dapat mendorong penilaian berdasarkan potongan informasi. Pengguna membaca judul, klip, atau ringkasan tanpa konteks; perdebatan menjadi reaksi terhadap simbol dan identitas. Sistem rekomendasi dapat mempercepat siklus perhatian yang singkat. Organisasi politik beradaptasi dengan memproduksi pesan yang mudah dikutip atau viral. Ketika debat bergerak cepat, koreksi fakta mungkin tertinggal jauh di belakang narasi yang telah menyebar.

Kewargaan digital yang sehat tidak menuntut semua warga menjadi ahli teknologi. Ia menuntut pengetahuan praktis untuk mengevaluasi sumber, mengenali iklan, memahami personalisasi, menjaga data, dan menggunakan mekanisme pengaduan. Literasi juga perlu bersifat struktural: warga harus memahami bahwa platform memiliki kebijakan dan model bisnis, bukan hanya menasihati individu agar berhati-hati. Pendidikan politik dapat membahas bagaimana visibilitas dibentuk dan bagaimana keputusan platform dapat dipersoalkan secara kolektif.

MENGUKUR KUALITAS RUANG PUBLIK ALGORITMIK

Penilaian perlu melampaui jumlah pengguna aktif, tayangan, komentar, atau kepuasan pelanggan. Indikator demokratis dapat mencakup proporsi konten berita lokal yang ditemukan melalui pencarian; sebaran jangkauan kandidat dan organisasi sipil; keberagaman sumber pada umpan pengguna; waktu respons atas permohonan banding; tingkat pembalikan keputusan moderasi; serta perbedaan kesalahan model lintas bahasa dan wilayah. Indikator harus diterjemahkan ke konteks dan tidak digunakan sebagai skor tunggal yang menutupi variasi.

Evaluasi juga harus menilai proses. Apakah warga memahami mengapa konten muncul? Apakah mereka dapat menonaktifkan personalisasi? Apakah kelompok terdampak dilibatkan dalam desain aturan? Apakah audit eksternal

dapat dilakukan? Apakah platform menyimpan catatan perubahan sistem? Apakah regulator memiliki kapasitas untuk meminta informasi? Pertanyaan ini mengukur apakah warga dan lembaga publik memiliki daya kendali, bukan sekadar apakah sistem menghasilkan keluaran yang tampak efisien.

Riset dampak memerlukan rancangan kausal dan komparatif. Eksperimen dapat menguji bagaimana perubahan rekomendasi memengaruhi paparan, tetapi hasil eksperimen terbatas pada sampel serta konteks tertentu. Studi audit dapat membuat akun simulasi dengan profil berbeda, namun harus mengikuti etika penelitian dan syarat layanan yang relevan. Wawancara dan etnografi dapat mengungkap bagaimana moderator atau jurnalis memahami aturan. Analisis kebijakan dan kontrak pengadaan dapat menunjukkan bagaimana kewenangan didistribusikan di balik sistem. Kombinasi metode memberi gambaran yang lebih kuat daripada hanya membaca metrik platform.

AGENDA TINDAKAN BAGI INDONESIA

Langkah pertama ialah membangun inventaris sistem yang memengaruhi ruang publik. Pemerintah dapat mencatat sistem rekomendasi dan moderasi yang dipakai dalam layanan resmi, sistem analisis sentimen, alat pemantauan, serta model generatif yang digunakan untuk komunikasi publik. Platform dan pengiklan dapat diwajibkan mengungkap kategori iklan politik, sponsor, target, dan periode tayang. Inventaris membantu masyarakat mengetahui titik-titik keputusan dan menghindari debat yang terlalu abstrak.

Langkah kedua ialah memperkuat akses data untuk penelitian independen. Regulator dapat menyusun protokol akses yang melindungi privasi serta keamanan, tetapi memungkinkan evaluasi atas sistem rekomendasi dan iklan. Perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil memerlukan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan mekanisme etis. Penelitian harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta melibatkan pemahaman konteks lokal. Tanpa bukti lokal, penilaian dapat terlalu bergantung pada laporan perusahaan atau studi negara lain.

Langkah ketiga ialah menetapkan hak pengguna yang dapat ditegakkan. Pemberitahuan moderasi harus jelas; banding harus tersedia; permintaan negara perlu dicatat; keputusan yang berdampak besar perlu memiliki penanggung jawab. Warga harus dapat meminta akses dan koreksi pada data yang digunakan untuk rekomendasi atau layanan. Penegakan perlu mempertimbangkan perusahaan besar dan kecil secara proporsional, dengan kewajiban yang sebanding pada tingkat risiko dan kemampuan.

Langkah keempat ialah memperkuat ekosistem informasi publik. Media lokal membutuhkan model pendanaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada iklan platform. Informasi penyelenggara pemilu harus tersedia dalam format yang dapat dibagikan, dibaca mesin, dan diterjemahkan. Lembaga publik perlu memiliki kanal koreksi cepat untuk rumor tentang prosedur pemilu. Namun kanal resmi tidak boleh menjadi satu-satunya sumber yang dianggap sah; media independen dan organisasi masyarakat harus tetap dapat mengawasi pemerintah.

Langkah kelima ialah mengembangkan model platform dan layanan digital yang berorientasi kepentingan publik. Layanan nirlaba, koperasi digital, jaringan komunitas, atau platform yang dikendalikan pengguna dapat menawarkan alternatif pada model bisnis ekstraksi perhatian. Alternatif tersebut tidak otomatis demokratis, tetapi dapat menguji mekanisme tata kelola yang berbeda: dewan pengguna, pengaturan rekomendasi yang dapat dipilih, moderasi berbasis komunitas dengan standar hak, dan kepemilikan data yang lebih terdistribusi.

Langkah keenam ialah membangun prosedur partisipasi publik atas perubahan sistem berisiko tinggi. Sebelum sistem digunakan untuk informasi pemilu, moderasi konten politik, atau penyaringan akses informasi publik, pihak terdampak perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan masukan. Konsultasi harus menjelaskan tujuan, alternatif, kelompok yang mungkin dirugikan, serta ukuran evaluasi. Pendapat publik perlu ditanggapi secara

tertulis dan dapat memengaruhi desain, bukan sekadar dicatat sebagai formalitas.

PENUTUP

Ruang publik tidak dikendalikan oleh algoritma sebagai benda teknis yang berdiri sendiri. Kendali berada pada jaringan aktor yang memiliki kemampuan berbeda untuk menentukan infrastruktur, data, model bisnis, ranking, moderasi, aturan, dan akses audit. Perusahaan platform berperan besar karena mengoperasikan saluran komunikasi dan menguasai informasi mengenai sistemnya. Negara membentuk batas hukum dan dapat melindungi atau menekan kebebasan. Pengiklan serta kampanye membeli jangkauan dan mengoptimalkan pesan. Media menafsirkan serta memverifikasi peristiwa. Warga berpartisipasi, tetapi menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pilihan.

Demokrasi di era algoritma menuntut perubahan fokus: dari pertanyaan apakah sistem efisien menuju pertanyaan siapa yang menetapkan tujuan dan siapa yang menanggung akibat. Sistem yang bekerja akurat sekalipun dapat memperbesar ketimpangan bila tujuan dan manfaatnya tidak disepakati secara publik. Sistem yang transparan pun belum akuntabel jika warga tidak dapat meminta koreksi. Untuk itu, keterbukaan harus dipasangkan dengan hak banding, audit independen, akses data, pilihan pengguna, perlindungan privasi, dan kapasitas regulator.

Masa depan ruang publik akan ditentukan oleh pilihan tentang bagaimana perhatian, informasi, dan partisipasi dibagikan. Indonesia perlu mengembangkan aturan yang melindungi kebebasan, sesuai dengan keragaman bahasa dan wilayah, serta dapat ditegakkan oleh lembaga yang memiliki keahlian. Platform harus mengakui bahwa keputusan ranking dan moderasi memiliki konsekuensi politik. Pemerintah harus mengawasi tanpa mengambil alih percakapan. Media dan akademisi perlu memperoleh akses untuk memeriksa dampak. Warga harus memiliki jalur nyata untuk menantang sistem yang membatasi suaranya.

Dengan tata kelola demikian, algoritma dapat menjadi alat untuk memperluas akses pada pengetahuan dan mempertemukan warga dengan gagasan yang beragam. Tanpa tata kelola, ia dapat menjadikan ruang publik sebagai lingkungan yang ditata terutama oleh kepentingan komersial, keputusan tertutup, dan ketimpangan daya. Kendali demokratis tidak berarti bahwa setiap warga memilih setiap rekomendasi. Artinya, aturan yang menentukan siapa terlihat dan bagaimana suara diperlakukan dibuat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diawasi oleh lembaga yang independen, serta terbuka untuk perubahan melalui partisipasi publik.

GLOSSARIUM

Algoritma: prosedur komputasional yang mengolah masukan dengan aturan tertentu untuk menghasilkan keluaran.
Amplifikasi algoritmik: peningkatan atau pengurangan jangkauan konten yang muncul dari pemeringkatan dan rekomendasi otomatis.
Deliberasi: pertukaran alasan dan bukti dalam pembentukan pendapat serta keputusan publik.
Demokrasi digital: praktik dan institusi demokratis yang menggunakan atau dipengaruhi teknologi digital.
Moderasi konten: proses menetapkan, menerapkan, dan meninjau aturan tentang konten yang diizinkan pada suatu layanan.
Mikrotargeting politik: penyampaian pesan politik kepada segmen audiens yang ditentukan berdasarkan data atau karakteristik tertentu.
Personalisasi: penyesuaian konten atau layanan bagi pengguna berdasarkan profil, perilaku, atau preferensi yang diperkirakan.
Platform governance: aturan dan praktik yang digunakan untuk mengatur layanan, pengguna, konten, dan akses pada platform digital.
Pluralisme: pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman pandangan, kelompok, dan kepentingan dalam kehidupan publik.
Recommender system: sistem yang memperkirakan dan menyarankan konten, produk, atau akun yang mungkin relevan bagi pengguna.
Ruang publik algoritmik: ruang komunikasi publik yang distribusi, keterlihatan,

dan interaksinya dimediasi oleh sistem algoritmik. Transparansi: keterbukaan mengenai tujuan, proses, data, dan dampak sistem yang memadai untuk mendukung pemahaman dan pengawasan. Kontestabilitas: hak dan kemampuan pihak terdampak untuk mempertanyakan, mengajukan banding, dan meminta koreksi keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Ananny, M., & Crawford, K. (2018). Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability. New Media & Society, 20(3), 973–989. https://doi.org/10.1177/1461444816676645

Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2023). Asymmetric ideological segregation in exposure to political news on Facebook. Science, 381(6656), 392–398. https://doi.org/10.1126/science.ade7138

European Commission. (2024). Commission guidelines for providers of very large online platforms and very large online search engines on the mitigation of systemic risks for electoral processes under Article 35(3) of Regulation (EU) 2022/2065. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-providers-vlops-and-vloses-mitigation-systemic-risks-electoral-processes

European Parliament and Council of the European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a single market for digital services (Digital Services Act). Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj

Gorwa, R. (2019). What is platform governance? Information, Communication & Society, 22(6), 854–871. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914

Gorwa, R., Binns, R., & Katzenbach, C. (2020). Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform

governance. Big Data & Society, 7(1). https://doi.org/10.1177/2053951719897945

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)

Huszár, F., Ktena, S. I., O'Brien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., & Hardt, M. (2022). Algorithmic amplification of politics on Twitter. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(1), e2025334119. https://doi.org/10.1073/pnas.2025334119

Jungherr, A. (2023). Artificial intelligence and democracy: A conceptual framework. Social Media + Society, 9(3). https://doi.org/10.1177/20563051231186353

Katzenbach, C., & Ulbricht, L. (2019). Algorithmic governance. Internet Policy Review, 8(4). https://doi.org/10.14763/2019.4.1424

König, P. D. (2023). Citizen conceptions of democracy and support for artificial intelligence in government and politics. European Journal of Political Research, 62(4), 1280–1300. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12570

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137